

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau pemilu merupakan arena pertarungan diantara para aktor didalam sebuah sistem demokrasi. Karena menjadi sebuah pertarungan, tentunya kalah dan menang merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, adanya pihak yang kalah dan juga yang menang dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan merupakan hal yang terkesan baru. Termasuk juga dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 terutama pemilihan DPR RI di Dapil DIY. Dengan Alokasi kursi 8 orang, sementara kandidat yang mencalonkan sebanyak 102 caleg, tentunya kekalahan menjadi hal yang biasa, apalagi bagi caleg yang merupakan wajah baru di pemilihan DPR RI.

Pemilu 2019 untuk merebutkan kursi DPR RI dapil DIY diikuti oleh 102 caleh yang berasal dari 15 partai politik. Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PSI, dan PAN mengajukan masing-masing 8 caleg. Partai Berkarya dan PPP dengan 7 caleg, Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang dengan 3 caleg, dan yang paling sedikit adalah Partai Garuda yang hanya mencalonkan 2 caleg (KPU DIY, 2019a). Hasil rekap model DC 1 DPR RI ada delapan caleg dari tujuh parpol yang memperoleh suara tertinggi. Berikut merupakan table nama-nama caleg yang lolos pada pemilu DPR RI Dapil DIY tahun 2019 :

Table 1.1

Caleg Lolos Pemilu DPR RI Dapil DIY Tahun 2019

No	Nama Caleg	Asal Partai	Perolehan Suara
1.	My Esti Wijayanti	PDIP	176.306
2.	H. A. Hanafi Rais, S.IP., MPP	PAN	171.316
3.	Drs. H. Mohammad Idham Samawi	PDIP	158.425
4.	H. Sukamto, SH	PKB	85.941
5.	Dr. H. Sukamta	PKS	73.425
6.	Andhika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Gerindra	69.925
7.	H. Subardi, S.H., M.H	Nasdem	67.920
8.	Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M	Golkar	65.535

Sumber : Diolah oleh peneliti dari KPU DIY (2019b).

Dari hasil pemilu DPR RI tahun 2019 di Dapil DIY, caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil DIY masih didominasi oleh petahana (Markus Yuwono, 2019). Namun, perolehan suara pada pemilu tersebut menunjukkan setidaknya ada 3 nama politisi petahana yang gagal menjabat kembali sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024. Ketiga politisi tersebut meliputi, Roy Suryo dari Partai Demokrat, Titiek Suharto dari Partai Berkarya, dan Agus Sulistiyono dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bukan hanya Pileg 2019, kekalahan petahana dan kemunculan pendatang baru bukanlah fenomena yang baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan hal ini juga tidak hanya terjadi di pemilu DPR RI saja, akan tetapi juga terjadi di pemilu-pemilu lain seperti pemilu DPRD dan juga Pilkada. Karena focus penelitian ini adalah pada pemilu DPR RI 2019 di Dapil DIY, sebagai gambaran awal bahwa kekalahan petahana dan kemunculan pendatang baru relative dinamis dapat dilihat pada pemilu 2014. Pada pemilu 2014 kemenangan didominasi oleh pendatang baru

yang baru pertama kali menjadi caleg DPR RI, seperti Sukamta dari PKS, Idam Samawi dari PDIP, Siti Hediati dari Golkar, dan beberapa caleg lain. Sementara itu, beberapa petahana yang kembali mencalonkan diri pada pileg 2014 setelah menang pada pileg 2009 akan tetapi tidak dapat lagi menjabat sebagai anggota DPR RI dikarenakan kalah adalah Gandung Pardiman dari Golkar, Rou Suryo dari Demokrat, Djuwanto dari PDIP dan beberapa caleg lain (KPU DIY, 2014).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kalah menang dalam pemilu merupakan hal yang biasa. Namun, menjadi menarik ketika seorang petahana yang telah menang selama 2 periode berturut-turut dikalahkan oleh pendatang baru, terlebih lagi dari partai yang sama. Petahana Agus Sulistiyono yang telah menjadi DPR RI Dapil DIY selama 2 periode berturut-turut dari Partai Kebangkitan Bangsa harus gagal setelah perolehan suaranya tidak bisa melampaui rekan satu partainya Sukamto sebagai wajah baru dalam pileg DPR RI (Jogja Inside, 2019).

Secara logika, sebagai seorang petahana peluang untuk memenangkan pemilu lebih besar daripada pendatang baru. Hal tersebut karena petahana memiliki *resources* selama menjabat sebagai anggota parlemen yang dapat dimanfaatkan untuk meraup suara pemilih, terlebih lagi Agus Sulistiono telah menjabat selama 2 periode berturut-turut. *Pertama*, sebagai seorang anggota parlemen, semestinya memiliki agenda masa reses 4 kali dalam 1 tahun. *Kedua*, fasilitas dari pemerintah selama menjabat sebagai parlemen, seperti kunjungan kerja. *Resources* tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk bertemu masyarakat dan mendapat dukungan kembali dari pemilih. Hal tersebut tentunya merupakan kesempatan yang tidak dimiliki oleh Sukamto sebagai pendatang baru dalam Pileg 2019.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan petahana Agus Sulistiyono pada Pemilu DPR RI Dapil DIY Tahun 2019. Adapun judul yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini adalah “KALAHNYA PETAHANA PADA PILEG 2019: STUDI KASUS TERHADAP AGUS SULISTIYONO (CALEG PKB) DI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah petahana yang dua kali berturut-turut menang seharusnya mempunyai potensi untuk kembali menang pada pertarungan politik yang ke-3 tetapi mampu dikalahkan oleh pendatang baru yang baru pertama kali maju sebagai caleg DPR RI dari patai yang sama. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengajukan pertanyaan “Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan caleg petahana PKB Agus Sulistiyono pada Pileg 2019 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan petahana caleg PKB Agus Sulistiyono kalah dalam pileg 2019 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti mengenai jatuhnya *incumben* dalam pemilu legislatif.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan bagi pembaga terkait dengan kegagalan *incumben* dalam perebutan kusi di DPR dalam konstestasi pemilu dan pentingnya mengetahui secara mendalam apa saja yang menjadi faktor-faktor yang membuat caleg *incumben* mengalami kekalahan.

c. Bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan dalam kajian ilmu politik dan juga memberikan referensi mengenai studi-studi terkait kegagalan dalam kontestasi pemilu secara khusus.

d. Bagi Pelaku Politik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pembelajaran bagi caleg *incumben* untuk meningkatkan strateginya dalam pemilu di kemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangsih serta kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, serta ilmu politik pada khususnya terkait dengan kajian yang berhubungan dengan petahan/*incumben* dalam pemilu legislatif.

E. Literatur Review

Penelitian ini menggunakan 20 literatur review yang bersumber dari artikel jurnal yang berbeda-beda yang tentunya berkaitan dengan judul yang diambil peneliti. Tujuan dari analisis kajian pustaka atau literature review ini adalah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga untuk menggali informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga didapat kebaharuan dalam penelitian ini. Literatur pada penelitian ini peneliti bagi menjadi empat klasifikasi. *Pertama*, Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory* yang terdiri dari 7 artikel jurnal yaitu dari Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), Chalik (2017), Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2018), Chalik (2015), Batubara & Asrinaldi (2018), Nasir (2015), dan Kriyantono, Ramadlan, & Setiawan (2015). *Kedua*, faktor kemenangan petahana dengan 4 artikel jurnal yaitu dari Boro (2010), Khoiron & Siboy (2018), Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018), Yusra & Darmawan (2017). *Ketiga*, faktor kegagalan petahana terdiri dari 3 artikel jurnal yaitu dari Abdulrahman (2015), Hidayat, Prasetyo, & Yuwana (2018) serta Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017). *Keempat*, faktor kemenangan pendatang baru sebanyak 6 artikel jurnal yang ditulis oleh Sanjaya (2017), Hasan, Hasrullah & Sultan (2018), Putri & Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017), Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2019), serta Gunawan, Bainus & Paskarina (2020).

Menurut Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019), ditinjau dari perspektif powercube, dalam pemilihan kepala desa di Simalungun Sumatera Utara, menghasilkan temuan bahwa dalam pemilihan kepala desa, kekuatan tersembunyi

menjadi point penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.

Menurut Chalik (2017) ditinjau dari perspektif teori *powercube*, dalam pemilu, terutama pilkada di Indonesia, terdapat 3 bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana. Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible power*). Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*). Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*).

Selanjutnya Fadli, Bailusy, Nas, & Zulfikar (2018) lebih memperjelas dimana dalam pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015, keterlibatan elit local cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Sementara itu, tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada.

Dari penelitian yang dilakukan Chalik (2015) dijelaskan bahwa dalam pemilu kepala daerah di Jawa Timur, kekuasaan petahana dalam mengambil dukungan dari elit local lebih besar dikarenakan biasanya beberapa petahana juga berasal dari kalangan kiai dan santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level basis. Dalam konteks teori *powercube*,

pada ruang dan eksistensi kekuasaan, elit local yang berbasis pesantren bersinergi dengan kekuatan politik, terutama dealam upaya mendukung petahana untuk kembali menang dalam kontestasi pemilu.

Sejalan dengan penelitian Chalik (2015), Batubara & Asrinaldi (2018) menyatakan bahwa sebagian besar tokoh agama sebagai kekuatan tidak terlihat dalam perspektif powercube, dalam hal ini Kyai sering memanfaatkan pola hubungan klientelistik untuk mendukung salah satu calon untuk memenangkan pemilu di Mandailing Natal. Hubungan klientelistik ini termasuk dalam invisible power dalam teory powercube. Namun, seperti yang terjadi di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, pola hubungan klientelistik dimanfaatkan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilu tanpa ada tujuan politik tertentu.

Nasir (2015) juga menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam, dan organisasi keagamaan seperti NU, Persis dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Disamping itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan yang juga berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik.

Menurut Kriyantono, Ramadlan, & Setiawan (2015) media massa menjadi kekuatan tersembunyi dalam pertarungan politik pada Pilkada Jawa Timur tahun 2015. Dalam pemilu tingkat local di Jawa Timur tahun 2015, Penyebaran informasi melalui media telah dicampuri kepentingan lain. kepentingan elit politik dan elit local membumbui penyebaran informasi yang kurang baik sehingga menyebabkan

turunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Boro (2010) menangnya kembali kandidat anggota legislatif petahana di Kabupaten Kupang tahun 2009 dikarenakan dukungan aspek figure kandidat dan aspek partai politik. Hal yang paling urgen adalah kandidat mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama. Selain itu, kandidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan kandidat juga konsisten pada janji politiknya. Situasi ini diperkuat dengan partai politik memberi persetujuan/restu politik bagi kandidat legislatif petahana untuk bertarung lagi dalam pemilu.

Khoiron & Siboy (2018) juga menarik kesimpulan bahwa keterpilihan para petahana dalam pilkada tahun 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang didukung dari faktor modal politik atau modal social yang positif dimata public, kampanye keberhasilan petahana dalam pembangunan infrastruktur, memaksimalkan program-program Bina Desa, kegiatan *door to door* kerumah warga, dan soliditas para kader dan relawan petahana.

Menurut Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018) Strategi yang digunakan incumbent dalam mempertahankan kekuasaanya pada pilukada Sulawesi Barat tahun 2011 antara lain: strategi kampanye berjalan dan manajemen tim yang berhasil berjalan efektif. Kampanye yang berjalan sejak incumbent tercermin dari cara incumbent dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Incumbent di Sulawesi Barat relatif berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Strategi manajemen tim yang sukses adalah cara informan mengambil tim yang mengkomunikasikan kesuksesannya selama masa jabatan gubernur di periode kedua.

Berbeda dengan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya, Yusra & Darmawan (2017) menyatakan bahwa Tindakan manipulasi dilakukan dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015, yang bertujuan untuk menggagalkan calon lain sehingga kemenangan petahana lebih mudah diraih karena hanya melawan calon “boneka”, terjadi karena adanya kepentingan memenangkan petahana dan pasangan calon lain dinilai berpotensi menyulitkan petahana jika tidak digagalkan maka caleg lain atau pendatang baru yang akan menang .

Menurut Abdulrahman (2015), terdapat beberapa alasan atas kegagalan caleg pertahanan pada pileg 2014 di Jawa Tengah, yaitu ketidak mampuan caleg petahana dalam menghadapi kompetisi internal dengan sesama caleg dalam satu partai. Pragmatisme pemilih, penyelenggara pemilu yang kurang profesional merupakan faktor-faktor yang memberikan sumbangan terhadap kekalahan caleg petahana.

Sedangkan Hidayat, Prasetyo, & Yuwana (2018) menyebutkan bahwa kekalahan telak incumbent dalam pilkades di Desa Tanjung membuktikan bahwa penggunaan uang dan penguasaan lembaga negara tidak berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa masih ada hubungan patron-klien yang dapat memengaruhi pemilih di pedesaan. Dalam hal ini, kepala desa terpilih merupakan termasuk golongan elite desa yang berasal dari golongan yang menjaga kesadaran hubungan patron-klien warga dari jasa orang tua terdahulu

saat menjabat kepala desa dan Karakter masyarakat di Desa Tanjung yang masih memiliki ikatan dengan nilai-nilai Jawa menjadi salah satu sebab penyebab keuntungan dalam konteks mengambil hati rakyatnya.

Sementara itu, temuan Yuliati, Raharjo, & Siswantoro (2017) dari analisis yang dilakukan pada pemilu tingkat local di Indonesia, menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan petahana.

Menurut Sanjaya (2017) dalam pendekatan marketing politik yang digunakan pendaftar baru pada pileg di Dapil Lamandau dibagi menjadi tiga yaitu *pull* marketing, *push* marketing dan *pass* marketing. Dalam melaksanakan pendekatan marketing tersebut target utamanya adalah perempuan karena program yang dibawa berkaitan dengan perempuan. Selain menggunakan marketing politik juga menggunakan influencer tokoh yang berpengaruh untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurut Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018), strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tenri Olle Yasin Limpo dan Adnan Purichta Ichsan dalam pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagai wajah baru dalam pilkada adalah diawali dengan mengamati permasalahan, ketokohan dan kelembagaan, perencanaan dan pembuatan program, mengambil tindakan komunikasi dan evaluasi program kerja.

Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa Adnan Purichta Ichsan menang sebagai kepala daerah Kabupaten Gowa tahun 2015. Walaupun kategori strategi yang dilakukan mereka sama, namun dalam kategori evaluasi program kerja, Hasan Hasrullah terjadi miss komunikasi dalam tim dan terbatasnya dana. Sementara itu, jaringan komunikasi Adnan Purichta Ichsan dari tingkat kabupaten hingga desa sangat rapi.

Faktor Kemenangan Koalisi sekaligus pendatang baru Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 menurut Putri & Qodir (2017) dipengaruhi beberapa factor. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya koalisi partai politik yang telah dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan, partisipasi politik yang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2010, dan Modalitas. Modalitas tersebut diantaranya modal politik, modal social modal budaya dan modal ekomomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Qodir (2017), Hertanto & Mulyaningsih (2017) menyebutkan bahwa kemenangan pendatang baru sekaligus Bupati perempuan pertama di Lampung Chununia Chalim pada Pilkada Lampung Timur tahun 2015 dipengaruhi oleh factor latar belakang keluarga, beliau merupakan keturunan dari kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur. Kekuatan figur ini memanfaatkan dukungan dari organisasi masyarakat (ormas) di bidang keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU), kelomppok ibu-ibu pengajian (Fatayat), dan Gerakan Pemuda Ansor.

Sedangkan Ratri, Amaliatulwalidain, & Isabella (2019) menyatakan bahwa kemenangan Yan Anton Ferdian sebagai wajah baru di Pilkada Kabupaten

Banyuasin tahun 2013 bersumber dari kekuatan dinasti politik yang dimilikinya. Kemenangan tersebut didapat kekuatan modal sosial sang ayah. Modal yang dimiliki oleh Yan Anton Ferdian berupa modal sosial sekaligus simbolik, modal politik dan modal ekonomi. Modal ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai strategi. Selanjutnya penerapan strategi tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Banyuasin berdasarkan pendekatan psikologis, sosiologis dan rasional, sehingga dengan itu dapat memenangkan pemilihan tersebut.

Menurut Gunawan, Bainus, & Paskarina (2020) pada konteks pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, strategi yang digunakan pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) sebagai pendaatang baru untuk melawan petahana adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan Pasangan Jadin mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik yang dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka. Dengan demikian strategi ofensif seperti perluasan pasar dan menembus pasar dilakukan dalam rangka meraup pemilih yang sebelumnya kerap mendukung dinasti politik petahana. Berikut ini peneliti sajikan taksonomi literature rivew dalam penelitian ini.

Table 1.2

Ringkasan Literatur Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Teori Kubus Kekuasaan/ <i>Powercube Theory</i>	Zakaria, Adelia, & Nurlela (2019) Chalik (2017) Fadli, Bailusy, Nas, dan Zulfikar (2018) Chalik (2015)	Dalam Teori Kubus Kekuasaan, dimensi bentuk kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan suara yang lebih terutama bentuk kekuasaan tersembunyi, dan tidak terlihat dengan memanfaatkan

		Batubara & Asrinaldi (2018) Nasir (2015) Kriyantono, Ramadhan, & Setiawan (2015)	pihak-pihak atau kegiatan yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, terutama elit agama dan elit local.
2.	Faktor Kemenangan Petahana	Boro (2020) Khoiron & Siboy (2018) Hariyanto, Hijjang, Tahir, & Kasnawi (2018) Yusra & Darmawan (2017)	Faktor utama yang menjadi faktor kemenangan petahana dalam pemilu adalah dukungan dari partai politik, aspek figure kandidat serta kamoanye berjalan yang dilakukan petahana selama masih memegang jabatan dalam politik.
3.	Faktor Kegagalan Petahana	Abdulrahman (2015) Hidayat, Prasetyo, Yuwana (2018) Yuliati, Raharjo, & Siswanto (2017)	Faktor yang menyebabkan seorang petahana gagal dalam meraih kembali kursi kekuasaan dalam pemilu adalah adanya kompetisi internal sesama caleg, ketidakpuasan pemilih baik terhadap kinerja maupun kepribadian calon, buruknya political marketing, patron-klien pendatang baru dan juga adanya isu-isu negative yang berkembang di masyarakat.
4.	Faktor Kemenangan Pendatang Baru	Sanjaya (2017) Hasan, Hasrullah, & Sultan (2018) Putri & Qodir (2017) Hertanto & Mulyaningsih (2017) Ratri, Amaliatulwalidin, & Isabella (2017) Gunawan, Bainus, & Paskarina (2020)	Faktor kemenangan pendatang baru didukung oleh marketing politik yang baik dengan cara memetakan segmentasi, targetting dan positioning, kemudian strategi komunikasi yang kompak sampai ke tingkat bawah, hingga modalitas yang cukup, termasuk modal social, budaya, dan ekonomi.

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020).

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan teori kubus kekuasaan/*powercube theory*, faktor kemenangan petahana, faktor kegagalan petahana, dan yang terakhir yaitu faktor kemenangan pendatang baru dalam pemilu. Maka untuk pembeda dalam penelitian kali ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas kegagalan caleg petahana Partai PKB pada pemilu 2019 di Dapil DIY dengan menggunakan pendekatan teori kubus kekuasaan. Focus penelitian ini adalah pada “Kalahnya

Petahana Pada Pemilu 2019 : Studi Kasus Terhadap Agus Sulistiyono (Caleg PKB)
Di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta”.

F. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan topic yang hendak diangkat dalam penelitian ini, maka teori yang akan digunakan adalah tiga teori diantaranya yaitu : *powercube theory*, konsep tentang partai politik, dan juga sistem pemilu.

1. Teori Kubus Kekuasaan/*Powercube Theory*

Teori kubus kekuasaan atau *powercube theory* adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh John Gaventa. Teori ini mengambil akar dari teori yang terlebih dahulu telah dicetuskan oleh gurunya, Steven Lukes. Dalam bukunya yang berjudul “Power A Radical View”, Lukes menjelaskan teori 3 dimensi kekuasaan. Dimensi pertama menjelaskan tentang kekuasaan yang hanya focus pada satu hal saja, yaitu tindakan aktor dalam pengambilan keputusan. Dimensi kedua masih focus terhadap kepentingan subjektif dalam bentuk pilihan atau bahkan keluhan. Dimensi ketiga focus ke aspek memperhatikan pembuatan kebijakan dalam agenda politik sekaligus melihat control terhadap agenda tersebut (Halim, 2014).

Berangkat dari teori yang dicetuskan oleh Lukes, menginspirasi Gaventa untuk menciptakan teori baru yang disebut sebagai teori kubus kekuasaan atau *powercube theory* ini. Teori dari Gaventa ini menjelaskan kekuasaan yang terdiri dari tiga sisi atau dimensi yaitu, dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk. Secara umum, teori ini dipahami sebagai control seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok yang lainnya. Konsep dari teori

ini sendiri muncul dari persoalan kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi belum ada sebuah kajian yang lebih mendalam bahkan komprehensif yang membahas tentang kekuasaan itu sendiri (Halim, 2014).

Secara umum, menurut Gaventa (2006) kekuasaan mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai berikut :

- a. Dimensi Tingkatan (*Dimensi Level*), yang terdiri atas: local, nasional dan juga global.
- b. Dimensi Ruang (*Dimensi Space*), yang terdiri atas: ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimed/created*).
- c. Dimensi Bentuk (*Dimensi Forms*), yang terdiri atas: bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible*), bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden*), dan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible*).

Dimensi yang pertama yaitu dimensi tingkatan atau dimensi *level*. pada dimensi ini menjelaskan tingkatan atau level kekuasaan yang hendak dikaji yang dikelompokkan menjadi 3 tingkatan yaitu, local, nasional, dan global. Dalam analisisnya, ketiga tingkatan level ini tidak dapat terpisahkan, maka dari itu, sebuah kekuasaan dalam skala local harus meliputi analisis di tingkat nasional bahkan tingkat global (Gaventa, 2006; Hendriks, 2010). Sebagai contoh, ketika kita membicarakan aspek ekonomi politik pemerintah local, persoalan pembebasan lahan secara paksa oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi yang mana investor-investor yang terkait adalah agen-agen global,

maka tidak tepat jika hanya membaca realitas politik local saja, akan tetapi juga perlu analisis tingkat nasional hingga global (Pojok Wacana, 2020).

Menurut Gaventa (2006) terdapat tiga jenis Ruang, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang tertutup (*closed*) adalah ruang dimana ada sekompok aktor atau elite yang difungsikan untuk mengambil keputusan tanpa adanya pihak lain dan tanpa adanya keinginan untuk membuka lebih luas ruang untuk kemungkinan masuknya pihak lain.
- b. Ruang tersediakan (*invited*) adalah ruang yang dimana sengaja dibuat oleh para penentu kebijakan baik pada level local, nasional, maupun gobal baik yang disahkan secara hukum atau tidak dan bertujuan untuk mengundang lebih banyak pihak duduk bersama memutuskan sesuatu, ruang ini diatur untuk kegiatan para kelompok dan untuk konsultasi. Ruang yang diundang dapt diatur artinya masih dilembagakan dalam bentuk konsultasi satu kali.
- c. Ruang terciptakan (*claim*) adalah ruang yang di buat secara mandiri oleh masyarakat umum yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas ruang-ruang yang telah tersdia diwilayah mereka untuk terlibat atau dibangun secara khusus untuk menyediakan ruang bagi aktivitas mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Akan tetapi ruang yang di kalim oleh aktor ini kurang kuat, untuk menciptakan sesuatu yang lebih banyak.

Sedangkan dimensi bentuk menurut Gaventa (2006) terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan terlihat (*visible power*) merupakan kekuasaan yang dapat terlihat di ruang public. Kekuasaan terlihat ini bisa dilihat ketika memasuki masa-

masa pemilihan atau kampanye, para elit-elit politik juga elit partai beramai-ramai untuk turun ke pemilih dengan menggunakan berbagai strategi kampanyenya masing-masing, memberikan arahan serta mengajak pemilih untuk terlibat dalam proses pemilu, adalah bukti bagaimana kekuasaan yang terlihat dijalankan dalam momentum pemilihan umum.

- b. Kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*) adalah kekuasaan dimana institusi tertentu yang berkuasa untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengontrol siapa yang dapat mengambil keputusan dalam sebuah agenda. Apabila melihat dari definisi tersebut dimana terdapat campur tangan dari institusi tertentu yang sedang berkuasa dan dikaitkan dengan pemilu legislatif, dengan demikian dukungan dari partai politik pengusung kepada caleg dan juga dukungan dari penyelenggara pemilu merupakan beberapa contoh dari kekuasaan tersembunyi. Selain itu, politik uang juga termasuk dalam kekuasaan tersembunyi. Hal ini dikarenakan praktik politik uang adalah transaksi nyata yang berusaha disembunyikan. Oleh karena itu, praktik politik uang termasuk juga dalam kekuasaan tersembunyi.
- c. Kekuasaan yang tak terlihat (*invisible power*) adalah kekuasaan yang paling terdalam dan tidak terlihat, dimana kekuasaan yang tidak terlihat ini, mampu membentuk batasan-batasan proses keterlibatan secara ideologis ataupun psikologis. Dalam konteks pemilu legislatif, melakukan upaya untuk memobilisasi tokoh agama merupakan salah satu yang termasuk dalam kekuasaan yang tidak terlihat.

2. Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang mana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama Budiardjo (2007).

Partai politik merupakan sekelompok orang yang terikat kuat oleh keyakinan, kepentingan dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kepentingan mereka, mungkin partai menawarkan sebuah kebijakan alternatif untuk pemerintahan atau menduduki jabatan publik tertentu dengan catatan cara meraih kekuasaan tersebut adalah melalui jalur yang sah, legal, dan konsitusional (Al-Hamdi, 2020). Neumann juga berpandangan bahwa partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili kepentingan politik masyarakat dengan tujuan mengawasi kekuasaan pemerintah serta berkompetisi untuk meraih dukungan dalam pemilu. Oleh karena itu, partai harus menjadi penyambung lidah kepentingan masyarakat dan pemerintah (Neumann, 1963; Al-Hamdi, 2020).

Tidak jauh berbeda dengan Neumann, Sartori juga berpendapat bahwa partai politik mempunyai peran yang sangat penting sebagai mediator antara

negara dan kepentingan masyarakat. Partai adalah elemen dasar dari pemerintahan yang demokratis dan alat bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi mereka (Sartori, 1976 ; Al-Hamdi, 2020). Senada dengan hal tersebut, Mainwaring menggarisbawahi bahwa partai politik itu diciptakan sebagai cara bagi para politisi untuk menghubungkan antaracivil society dengan negara serta mewujudkan kepentingan masyarakat (Mainwaring, 1991 ; Al-Hamdi, 2020).

Cangara (dalam Labolo & Ilham, 2015) menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu :

1. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan guna membangun kekuatan mayoritas.
2. Partai sebagai organisasi, untuk mampu menjadi institusi yang dimanis, eksis dan berkelanjutan, partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan juga dibesarkan sehingga mampu menjadi menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus sebagai representasi dari sejumlah orang ataupun kelompok.
3. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Untuk mampu menduduki jabatan-jabatan public, para calon yang diajukan oleh partai politik didukung secara konkret oleh partai politik tersebut. Dari posisi tersebut, partai politik mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi ataupun mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan di

kementerina dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.

Sementara itu, terkait dengan struktur organisasi partai politik di Indonesia, mayoritas dari mereka menggunakan pola top-down. Hal ini karena sejumlah regulasi terkait dengan pendirian partai politik, yaitu partai politik harus memiliki pengurus pusat di tingkat nasional. Pada level provinsi, ada pengurus tingkat provinsi. Ada juga pengurus di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa, bahkan ada juga pengurus di bawah level desa (Al-Hamdi, 2020).

Al-Hamdi (2020) juga menjelaskan terkait klasifikasi partai politik di Indonesia yaitu berdasarkan ideology dan berdasarkan status kekuatan organisasi partai. Dalam bukunya, Al-Hamdi mengklasifikasikan partai politik di Indonesia berdasarkan ideology dibagi menjadi tiga spectrum utama yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-muslim, dan nasionalis-islam. *Pertama*, nasionalis-sekuler yang memiliki karakteristik, menjadikan Pancasila sebagai ideology partai, memisahkan urusan agama dan politik pemerintahan, menolak gagasan syariat islam & negara islam, dan secara jelas mendeklarasikan sebagai kelompok sekuler. Contoh partai dalam kelompok ini adalah PDIPerjuangan.

Kedua, kekuatan nasionalis-muslim yang memiliki karakteristik, menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai, menggunakan nilai-nilai agama sebagai basis politik, menolak syariat Islam dan konsep negara Islam, dan didominasi oleh kalangan santri. Contoh partai yang dapat mewakili gambaran

kelompok ini adalah PAN dan PKB. *Ketiga*, kekuatan nasionalis-islamisme yang memiliki empat karakteristik yaitu, menerima nilai-nilai Pancasila, menekankan pada isu-isu seputar demokrasi dan governance, menjadikan Islam sebagai asas/ideologi partai dan menggunakan simbol dan ajaran Islam ke dalam atribut kepartaian, dan didominasi oleh kalangan Muslim taat. Contoh partai yang masuk dalam kelompok ini adalah PKS, PPP, dan PBB.

Al-Hamdi (2020) juga mengklasifikasikan partai politik di Indonesia berdasarkan kekuatan organisasi yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu, *pertama*, partai besar (*major parties*) yaitu partai-partai yang memperoleh suara di atas 10% pada Pemilu 2019. Partai-partai di kategori ini adalah nasionalis-sekuler. Partai yang termasuk dalam kategori ini seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar. *Kedua*, partai menengah (*medium parties*) yaitu Partai-partai yang memperoleh suara antara 4% dan 10% pada Pemilu 2019. Mayoritas partai Islam ada di kategori ini. Partai yang termasuk dalam kategori ini seperti PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. *Ketiga*, partai kecil (*small parties*) yaitu Partai-partai lama yang tidak mampu meraih ambang batas 4% suara secara nasional pada Pemilu 2019 maupun Partai-partai yang baru ikut berkontestasi pada Pemilu 2019 dan belum pernah menjadi kontestan pada pemilu sebelumnya. Perindo, Berkarya, PSI, dan Partai Garuda merupakan contoh partai yang masuk dalam kategori ini.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah penarikan batas yang memberikan penjelasan tentang suatu konsep secara singkat, padat dan juga jelas (Imam, 2008). Definisi konseptual pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. *Powercube Theory* atau teori kubus kekuasaan adalah teori yang dapat dipakai untuk memetakan hal-hal yang berperan didalam kekuasaan, para aktor didalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya. Teori ini sekaligus mampu menganalisis mengapa seseorang berpotensi memenangkan maupun kalah dalam pertarungan politik. Teori ini terdiri dari 3 dimensi yaitu, dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk.
2. Pemilu adalah aktivitas untuk memilih wakil rayat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang disepakati melalui pemberian suara dari rakyat.
3. Partai Politik adalah organisasi dibidang politik yang beranggotakan orang-orang yang memiliki visi-misi dan tujuan yang sama. Partai politik juga merupakan organisasi yang menjadi jembatan antara calon wakil rakyat dengan jabatan politik.
4. Caleg adalah calon legislatif yaitu sebutan bagi seseorang yang mengajukan diri ikut pada pemilihan anggota legislatif.
5. Petahana adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada kandidat legislatif yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif dan mencalonkan diri kembali di pemilihan umum berikutnya yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan serta posisi yang telah diduduki.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih focus menjelaskan ciri-ciri yang spesifik dan lebih terperinci dari suatu konsep yang digunakan oleh peneliti (Imam, 2008). Pada penelitian ini, definisi operasional yang digunakan peneliti adalah dimensi bentuk dari teori kubus kekuasaan (*powercube theory*). Dimensi bentuk dari teori kubus kekuasaan dirasa merupakan dimensi yang paling relevan untuk menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan melihat dari aspek dimensi bentuk yang terdiri dari kekuasaan terlihat, kekuasaan tersembunyi, dan kekuasaan tidak terlihat dapat menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan berperan dalam pencalonan Agus Sulistiyono pada Pileg 2019 di dapil DIY. Lebih dari itu dengan menggunakan dimensi bentuk dari teori kubus kekuasaan ini, dari ketiga bentuk kekuasaan yakni kekuasaan terlihat, kekuasaan tersembunyi, dan kekuasaan tidak terlihat, dapat ditarik kesimpulan bentuk kekuasaan mana yang paling berpengaruh terhadap kekalahan yang dialami Agus Sulistiyono pada Pileg 2019 di dapil DIY. Tabel 1.3 akan menggambarkan dimensi bentuk yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Table 1.3

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Dimensi Bentuk <i>Powercube Theory</i> (Gaventa, 2006)	<i>Visibel Power/ Kekuasaan Terlihat</i>	Strategi kampanye kandidat
		<i>Hidden Power/ Kekuasaan Tersembunyi</i>	Dukungan dari partai politik Dukungan dari penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU serta jajarannya sampai tingkat bawah) Politik Uang

		<i>Invisible Power/Kekuasaan Tidak Terlihat</i>	Mobilisasi Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
--	--	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti (2020).

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan juga interpretasi terhadap realitas kehidupan yang didasarkan pada apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian empiris biasanya melibatkan sejumlah data lapangan/bukti empiris yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu.

Dalam penelitian kualitatif, ada lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu naratif, fenomenologis, etnografis, grounded theory dan studi kasus. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena pendekatan studi kasus sangat relevan dengan topic yang peneliti ambil. Secara definitive, pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan untuk menyelidiki serta memahami satu, dua, atau lebih dari kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian, dibatasi oleh ruang/tempat dan waktu, dan juga tentunya pengumpulan sumber data yang melibatkan banyak pihak agar didapatkan pemahaman yang mendalam dan juga komprehensif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi, 2020). Studi kasus penelitian ini adalah Jatuhnya

Petahana Pada Pileg 2019: Studi Kasus Terhadap Agus Sulistiyono (Caleg PKB)
Di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan topic yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari caleg yang gagal dalam mempertahankan kursi legislative pada pemilu 2019 di dapil DIY yaitu Bapak Agus Sulistiyono yang berasal dari partai PKB, tim sukses Bapak Agus Sulistiyono, Partai PKB, KPU dan Bawaslu, dan Tokoh Agama terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*liberary research*) menggunakan data yang tersedia yang berupa bahan-bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, undang-undang, artikel, dan sebagainya yang dianggap relevan dengan topic dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang terjalin antara pewawancara atau biasa disebut *interviewer* dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai/*interviewee* yang dilakukan melalui komunikasi langsung

tatap muka ataupun secara daring atau online (Yusuf, 2014 : Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi 2020). Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber :

- 1) Bapak Agus Sulistiyono
- 2) Tim Sukses Bapak Agus Sulistiyono
- 3) Partai Kesatuan Bangsa
- 4) KPU dan Bawaslu
- 5) Tokoh Agama terkait

b. Teknik Studi Dokumentasi

Dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), dijelaskan bahwa teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena data berupa dokumen juga menyimpan informasi penting dan fakta yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa buku-buku, jurnal, atau gambar.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data *statistic descriptive*. Menurut Sugiono dalam Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), *statistic descriptive* adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020), yang mana langkah-langkah dalam analisis data dibagi menjadi 4 langkah yaitu :

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian, kemudian melakukan pengelolaan data. Pengelolaan data dapat berupa penyalinan hasil rekaman suara wawancara menjadi teks, kemudian data-data yang sudah terkumpul dipilah-pilah atau dikelompokkan berdasarkan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi Data

Pada tahapan ini, peneliti akan memilih dan memilah data yang berguna serta data yang relevan untuk dipakai dalam proses analisis, apakah data tersebut berupa data deskripsi maupun data table dan gambar, dan menyisihkan data-data yang dianggap kurang relevan dengan topic yang diambil dalam penelitian ini.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Dalam tahapan ini, peneliti akan mengaitkan temuan satu variable atau indikator dengan variable atau indikator yang lainnya. Kemudian apabila ditemukan data yang bersimpangan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, maka peneliti akan melakukan verifikasi dengan cara mengonfirmasi ke pihak narasumber.

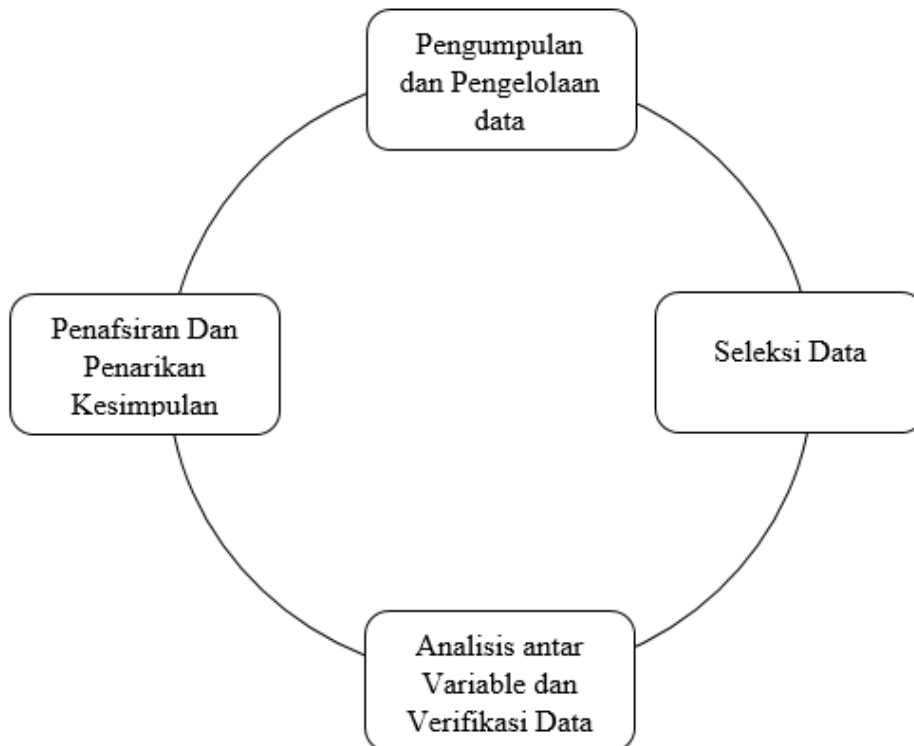
d. Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti akan menafsirkan hasil data yang merupakan usaha untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan di awal yang didasarkan pada analisis antar-variabel dan verifikasi data yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penafsiran inilah yang kemudian dijadikan dasar pijakan untuk menarik kesimpulan penelitian.

Langkah-langkah dalam analisis data menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, & Efendi (2020) dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber : Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi (2020).

J. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat kemudahan dalam pembahasan, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil caleg dan profil Dapil DIY.

BAB III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan petahana caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dari Patai PKB kalah dalam Pileg 2019.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.